



LAPORAN

Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pembangunan Unit Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Tahun 2022 di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal

DPR RI

Nomor ST : 190/PI.05.05/VIII/2022

Daftar Isi

	Halaman
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup	5
D. Metode Pendampingan	5
E. Jangka Waktu Pendampingan	5
F. Susunan Tim Pendampingan	5
Bab II Hasil Pendampingan Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2022 di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI	6
A. Tahap Pendampingan	6
B. Hasil Pemutakhiran LKE ZI Pusat Kajian Anggaran Tahun 2022	6
Bab III Penutup	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal mendukung program Pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Setjen DPR RI yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkan reformasi birokrasi, diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil reformasi birokrasi tersebut, DPR RI perlu membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di lingkungan Setjen DPR RI melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di Setjen DPR RI, perencanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah dideklarasikan di Pusat Kajian Anggaran pada tahun 2022 oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1571 Tahun 2021);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021;
8. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor 190/PI.05.05/VIII/2022 untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Pembangunan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2022 di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI.

C. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pendampingan

Tujuan pendampingan adalah memberikan pemahaman, mendorong dan memonitor dalam persiapan, pengumpulan eviden dan penginputan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam rangka pembangunan ZI menuju WBBM di Pusat Kajian Anggaran.

Sasaran pendampingan adalah pembangunan ZI Pusat Kajian Anggaran menuju WBBM sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 untuk unit kerja melakukan pembangunan menuju WBBM minimal 1 (satu) tahun.

Ruang lingkup pendampingan adalah proses pengumpulan eviden dan penginputan LKE ZI di Pusat Kajian Anggaran.

D. Metode Pendampingan

Metode pendampingan yang dilakukan adalah melalui diskusi, koordinasi dan komunikasi aktif, untuk memberikan pemahaman, mendorong dan memonitor dalam persiapan, pengumpulan eviden dan penginputan LKE dalam rangka pembangunan ZI menuju WBBM di Pusat Kajian Anggaran.

E. Jangka Waktu Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan mulai tanggal 3 Agustus sampai dengan 2 September 2022.

F. Susunan Tim Pendampingan

Sesuai Surat Tugas Inspektur II, Tim Pendamping Pembaguan ZI di Pusat Kajian Anggaran adalah:

No.	Nama	Jabatan
1.	<u>Piping Effrianto, S.E., M.Si, CFA.</u> NIP. 196404111984031001	Pengendali Mutu
2.	<u>Einstinanto, S.H., M.Kn., QGIA</u> NIP. 198009302010011017	Pengendali Teknis
3.	<u>Antonius Deryal Gamanno, S.E., QGIA.</u> NIP. 199307282018021001	Ketua Tim
4.	<u>Mufti Fikri Nur Fauzi, A.Md.Ak.</u> NIP. 199608032019031001	Anggota Tim
5.	<u>Nehemia Nugraha, A.Md.Ak.</u> NIP. 19981107202101001	Anggota Tim

BAB II

HASIL PENDAMPINGAN

PEMBANGUNAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022 DI PUSAT KAJIAN ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

A. Tahap Pendampingan

Pembangunan ZI di Setjen DPR RI tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 543/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Unit Kerja Untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022.

Telah diterbitkan Surat Tugas Kepala Pusat Kajian Anggaran Nomor 275/PI.03.05/03/2022 untuk memberikan uraian tugas tim penyelenggaran pembangunan zona integritas pada Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.

Telah dilaksanakan pertemuan dengan Tim Pembangunan ZI Pusat Kajian Anggaran pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dengan agenda pemutakhiran LKE ZI dengan LKE ZI terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/332/PW.04/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Setjen DPR RI Tahun 2021, berikut merupakan rekapitulasi hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Pusat Kajian Anggaran:

Catatan	Rekomendasi	Hasil Klarifikasi
Telah mengembangkan inovasi yang dapat memudahkan <i>stakeholder</i> apabila memerlukan kajian anggaran (<i>Budget Issue Brief</i>), sehingga dapat tersampaikan kepada <i>stakeholder</i> secara cepat, ringkas, dan lengkap beserta rekomendasinya	Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas inovasi yang telah dibangun agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat pada <i>stakeholder</i>	Sudah dilakukan rapat-rapat terkait evaluasi dan monitoring atas <i>Budget Issue Brief</i> dan inovasi yang telah dilakukan di tahun 2021-2022.
Agen perubahan telah menyusun rencana tindak, namun belum maksimal monitoring evaluasi atas capaiannya	Memaksimalkan pelaksanaan monitoring evaluasi peran agen perubahan serta mengukur tingkat pemahaman pegawai terhadap Pembangunan Zona Integritas dan nilai-nilai organisasi yang telah dibangun	
Telah menerapkan tata kelola berbasis ISO 9001:2015	Melanjutkan pembangunan Zona Integritas dengan orientasi pelayanan prima sehingga dapat menjadi unit kerja percontohan yang tidak hanya di lingkup internal Setjen DPR RI, tetapi dapat sampai di lingkup instansi Pemerintah	Rekomendasi belum dilaksanakan, dan akan dilakukan pembahasan internal terlebih dahulu.

B. Hasil Pemutakhiran LKE ZI Pusat Kajian Anggaran Tahun 2022

Pusat Kajian Anggaran telah melakukan pemutakhiran LKE ZI Tahun 2022 sesuai dengan pembagian koordinator dalam Surat Tugas Kepala Pusat Kajian Anggaran, berikut merupakan LKE ZI Pusat Kajian Anggaran:

1. Terdapat tambahan data dukung/eviden pada Area I Manajemen Perubahan yaitu:
 - a. Rencana Aksi Agen Perubahan Pusat Kajian Anggaran tahun 2022;
 - b. Progres Renaksi Agen Perubahan Pusat Kajian Anggaran tahun 2022.
2. Terdapat tambahan data dukung/eviden pada Area II Penataan Tatalaksana yaitu:
 - a. Rancangan SOP ARC;
 - b. SOP analisis di luar siklus pembahasan APBN;
 - c. SOP dukungan pembahasan APBN AKD dan unit lain yang merujuk pada Persekjen 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Setjen DPR RI;
 - d. Pengiriman Produk Pusat Kajian Anggaran dengan menggunakan SMS Blast Setjen DPR RI (evidence capture SMS *blast*).
3. Terdapat tambahan data dukung/eviden pada Area III Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yaitu Surat permohonan pelaksanaan diklat dari Pusat Kajian Anggaran atau surat tugas keikutsertaan pegawai Pusat Kajian Anggaran dalam diklat yang diselenggarakan Pusdiklat atau unit/lembaga lain sejak Januari 2022.
4. Terdapat tambahan data dukung/eviden pada Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu:
 - a. Melakukan pengintegrasian semua produk Pusat Kajian Anggaran ke dalam aplikasi Simfoni yang telah ada di bawah Biro Persidangan. Aplikasi Simfoni adalah aplikasi yang dibuat oleh Setjen DPR RI untuk memudahkan Alat Kelengkapan DPR RI untuk melakukan distribusi bahan-bahan rapat dalam bentuk *soft file*.

- b. Melakukan SMS *blast* untuk semua produk Pusat Kajian Anggaran ke nomor Anggota DPR, Kepala Bagian di seluruh Alat kelengkapan Dewan (Komisi), Tenaga Ahli Fraksi, dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan.
- c. Melakukan peningkatan kualitas tampilan website puskajiananggaran.dpr.go.id. Perbaikan dilakukan salah satunya berupa pengklasifikasian produk menjadi hasil kajian per produk, hasil kajian per komisi, dan hasil kajian per topik.
- d. Membuat produk baru hasil evaluasi dari pelaksanaan Rencana Tindak Pusat Kajian Anggaran "*Budget Issue Brief (BIB)*" berupa produk "Sekilas APBN". BIB disusun berdasarkan isu yang berkembang di pembahasan Komisi. Sedangkan sekilas APBN disusun berdasarkan isu yang berkembang di media massa. Sekilas APBN dilahirkan untuk menambahkan *coverage* isu yang harus di *supply* ke Anggota Dewan.
- e. Menyusun produk baru berupa "Masukan Pusat Kajian Anggaran Atas Nota Keuangan RAPBN 2023". Produk ini merupakan upaya Pusat Kajian Anggaran untuk mendekatkan kebutuhan Anggota untuk memahami isu-isu yang krusial di Nota Keuangan yang terdiri dari ratusan halaman. dengan lebih cepat dan ringkas. Produk ini dapat digunakan juga untuk memudahkan fraksi dalam menyusun Pandangan Fraksi atas Nota Keuangan 2023.
- f. *Screenshot* pengintegrasian produk Pusat Kajian Anggaran di aplikasi Simfoni;
- g. *Screenshot* bukti penyampaian SMS *Blast* ke nomor Anggota DPR;
- h. *Screenshot* tampilan website Pusat Kajian Anggaran atas perbaikan penyajian produk terbaru
- i. *Screenshot* produk baru berupa Sekilas APBN dan Masukan Pusat Kajian Anggaran Atas Nota Keuangan RAPBN 2023.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran. Oleh karena itu inovasi unggulan yang diusung oleh Pusat Kajian Anggaran adalah *Budget Issue Brief* (BIB).
2. Produk dari Pusat Kajian Anggaran adalah Analisis APBN, Referensi APBN, Analisis Ringkas Cepat (ARC), Buletin APBN, Buku, dan Jurnal *Budget*. Analisis Ringkas Cepat (ARC) disusun berdasarkan permintaan dari Anggota Dewan, sedangkan *Budget Issue Brief* (BIB) disusun berdasarkan hasil rapat Komisi tanpa permintaan dari Anggota yang menjadikan BIB disusun berdasarkan inisiatif dari Pusat Kajian Anggaran.
3. Pusat Kajian Anggaran tidak hanya mendukung terkait anggaran secara langsung, namun juga isu yang berkaitan dengan APBN dan tidak berkaitan secara langsung dengan anggaran. Selain itu BIB mendukung fungsi anggaran yang ada pada Komisi I s.d. XI, hal ini merupakan inovasi diluar tugas pokok dan fungsi Pusat Kajian Anggaran yang diatur dalam UU MD3 yaitu hanya melaksanakan dukungan fungsi anggaran yang ada di Banggar.
4. Pusat Kajian Anggaran mendapatkan Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2021.
5. Inspektorat Utama mengapresiasi komitmen, kinerja, hasil, serta kerja sama dalam koordinasi dan pemenuhan data dukung dari Pusat Kajian Anggaran, diharapkan capaian yang telah dicapai oleh Pusat Kajian Anggaran dapat memotivasi dan menjadi unit percontohan bagi unit kerja lain dalam proses pembangunan ZI menuju WBK.

6. Untuk Tahun 2022 pembangunan ZI Pusat Kajian Anggaran dimaksudkan untuk menjawab Amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, yaitu salah satu syarat bagi unit kerja untuk diusulkan dan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah minimal 1 (satu) tahun pembangunan menuju WBBM.

B. Saran

Berikut merupakan saran yang dapat diberikan kepada Pusat Kajian Anggaran terkait kegiatan pembangunan ZI menuju WBBM:

1. Agar Pusat Kajian Anggaran dapat memulai untuk pemutakhiran LKE ZI berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021, beserta data dukung/eviden dan dapat disimpan di *Cloud/Google Drive*.
2. Agar Pusat Kajian Anggaran dapat mendokumentasikan data dukung terkait proyek perubahan atau inovasi dari Agen Perubahan serta kegiatan-kegiatan perbaikan yang telah dilakukan di Tahun 2022 untuk dapat nantinya digunakan untuk pemenuhan eviden ZI Pusat Kajian Anggaran menuju WBBM di Tahun 2023.

Jakarta, 16 September 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn